

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ida Zuraida dan L.Y. Hari SIH Advianto, *Penagihan Pajak : Pajak Pusat Dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi, 2011.

Muhammad Djafar Saidi, *Buku Ajar Hukum Pajak* (Purwokerto: Penerbit Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED Press), 2020).

Wirawan B Ilyas Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Jurnal

Annisa Febrianda et al., “Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan,” *MENAWAN* :

Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi 2, no. 4 (2024),
<https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743>.

Cinantlya Kumaratih and Budi Ispriyarso, “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif

PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020),
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>.

I Nyoman Darmayasa, Putu Ayu Rita Pariani, and I Nyoman Mandia, “Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap

- Kepatuhan UMKM,” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>.
- Kevin Putra and Subagijo Gunardie, “Hukum Pajak Dan Tantangan Dalam Pemungutan Pajak” 2, no. 2 (2024).
- Made Dwi Surya Suasa, I Made Arjaya, and I Putu Gede Seputra, “Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 9, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>.
- Melissa Ariffin and Tunjung Herning Sitabuana, “Sistem Perpajakan Di Indonesia”, Seri Seminar Nasional ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022, no. 28 (2022).
- Muhammad Helmy Hakim, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>.
- Rahilla Fatima Azzahra dan Aminah, “Pengaruh Implementasi PP 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan WPOP Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak,” *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 15, no. 2 (2024).
- Sultan, Heffi Christya Rahayu, and Purwiyanta, “Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5 (2023). <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.198>
- Yana Indawati, Teddy Prima Anggriawan, and Pusaka Bintang Sakti, “Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).

Yunita Sari Rioni, “Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat,” *Jurnal Perpajakan* 1, no. 2 (2020).
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>.

INTERNET

Annisa Anastasya, “Data UMKM, Jumlah Dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia,” UKMINDONESIA.ID, 2023,
<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia#:~:text=Peran>
UMKM sangat penting bagi,di tingkat nasional dan daerah, diakses pada tanggal 06 Desember 2024.

Aptri Oktaviyoni, “Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka”,
Direktorat Jenderal Pajak, 2024,
<https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

Cermati, “Pajak Penghasilan Dan Cara Menghitungnya,” cermati, 2023,
<https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya>, diakses pada tanggal 13 November 2024.

Imam Dharmawan, “Manfaat Pajak Untuk Program Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat,” 2024,
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program->

pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

Imam Dharmawan, “Dukungan Pajak Atas UMKM, Menuju Masa Depan Ekonomi Indonesia Cerah,” *djp*, 2024, <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/dukungan-pajak-atas-umkm-menuju-masa-depan-ekonomi-indonesia-cerah>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

Kadek Wulan Dari, “Pengetahuan Umum Perpajakan,” *pajakku*, 2019, <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/--wwwpajakkucom-read-5dae9cb04c6a88754c088066---wwwpajakkucom-read-5dae9cb04c6a88754c088066---wwwpajakkucom-read-5dae9cb04c6a88754c088066---wwwpajakkucom-read-5dae9cb04c6a88754c088066---wwwpajakkucom-r>, diakses pada tanggal 13 November 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Menko Airlangga: Pemerintah Dukung Bentuk Kolaborasi Baru agar UMKM Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Global”, [www.ekon.go](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5885/menko-airlangga-pemerintah-dukung-bentuk-kolaborasi-baru-agar-umkm-indonesia-jadi-bagian-rantai-pasok-industri-global#:~:text=Jakarta%2C%2022%20Juli%202024,total%20tenaga%20kerja%20di%20Indonesia), , <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5885/menko-airlangga-pemerintah-dukung-bentuk-kolaborasi-baru-agar-umkm-indonesia-jadi-bagian-rantai-pasok-industri-global#:~:text=Jakarta%2C%2022%20Juli%202024,total%20tenaga%20kerja%20di%20Indonesia>.” di akses pada tanggal 13 November 2024.

Otto Budihardjo, “Reformasi Pajak Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (1),” 2021,

<https://www.konsultanpajaksurabaya.com/reformasi-pajak-dalam-undang-undang-harmonisasi-peraturan-perpajakan-1#gsc.tab=0>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

Santi, “WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final Dan Ketentuan Umum,” djp, 2024,

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/wp-op-umkm-fasilitas-pph-final-dan-ketentuan-umum>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

Upasana Sarkar, “Doctrinal and Non- Doctrinal Legal Research,” Pleadings, 2024,

<https://blog.ipleaders.in/all-about-doctrinal-and-non-doctrinal-research/#>, diakses pada tanggal 07 Januari 2025.

Wawancara

Mohammad Fadhil Rahman, Wawancara dengan *Account Representative* Kantor

Pelayanan Pajak Semarang Candisari pada tanggal 11 Februari 2025.

LAMPIRAN

A. Surat Izin Riset

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS HUKUM	Jalan dr. Antonius Suryo Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275 Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206 Laman: www.fh.undp.ac.id E-mail: fh@five.undp.ac.id
Nomor	: 205 /UN7.F1/AK/II/2025	10 FEB 2025
Lamp.	:	
Hal	: Permohonan Riset/penelitian	
 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari Jl. Setia Budi No.3, Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah		
 Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.		
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitiandilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:		
Nama	: Yustina Arif	
NIM	: 11000121140757	
Alamat	: Desa Ketanjung RT. 05/RW. 02, Kec. Karanganyar, Kab. Demak, Jawa Tengah, 59582	
Nomor HP	: 087826536800	
Bidang minat	: Hukum Administrasi Negara	
Judul skripsi	: Implementasi Kebijakan Terkait Penyesuaian Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM Di KPP Pratama Semarang Candisari.	
 Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.		
 Retno Saraswati, S.H., M.Hum. NIP 196711191993032002		

B. Surat Jawaban



Yustina arif <yustinaa028@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

25 Februari 2025 pukul 07.17

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: yustinaa028@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D. SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416, 3540075, 3544035, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-65/RISET/WPJ.10/2025 Semarang, 25 Februari 2025
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Yustina Arif

Desa Ketanjung, Rt 05/rw 02, Kec. Karanganyar, Kab. Demak, Jawa Tengah, 50582

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01015-2025** pada **24 Februari 2025**, dengan informasi:

NIM : 11000121140757
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro
Judul Riset : Implementasi Kebijakan Terkait Penyesuaian Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Umkm Di Kpp Pratama Semarang Candisari
Izin yang diminta : Data, Wawancara.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Semarang Candisari**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **25 Februari 2025 s/d 24 Agustus 2025**.
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bayu Setiawan